

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kurangnya peranan BPD dalam rencana pembangunan Desa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Hal demikian terjadi karena kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa pembangunan Desa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang masih belum maksimal, baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya hal ini terlihat pada setiap proses perencanaan pembangunan Desa BPD kurang aktif untuk terlibat dalam melakukan musyawarah, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap rencana pembangunan Desa. Adapun hambatan-hambatan BPD dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan Desa yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dalam hal ini pemahaman BPD terhadap tugas dan fungsinya masih lemah dan juga BPD memiliki latar belakang pekerjaan lain, sehingga berakibat pada peran yang tidak maksimal terkhusus pada perencanaan pembangunan. Lemahnya koordinasi, transparansi BPD dan Kepala Desa dalam kerja sama mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Oeltua.

#### **6.2 Saran**

Beberapa saran dari peneliti kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam faktor kendala pelaksanaan peran dan Fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam kepengurusan BPD. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa BPD Desa Oeltua terdiri dari 9 orang pengurus BPD. Pengurus BPD memiliki latar belakang pendidikan tamatan SMA dan bahkan ada yang tamatan SMA ke bawah.

Kondisi ini dikaitkan dengan tuntutan perencanaan pembangunan saat ini tentunya masih belum efektif, di mana hal tersebut memerlukan pemahaman dan penguasaan konsep-konsep yang luas, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, termasuk di tingkat desa maupun di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi lagi, dan selain itu juga BPD di desa Oeltua memiliki latar belakang pekerjaan sebagai petani jadi hal tersebut juga yang menjadi faktor penghambat tidak efektifnya peran BPD dalam kapasitas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hal rencana pembangunan desa Oeltua.

2. Lemahnya kerjasama kemitraan antara Pemerintah Desa dengan BPD. BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya. Kondisi ini terlihat kurang efektifnya hubungan kerja, komunikasi, dan kerjasama BPD dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai kewajibannya masing-masing.
3. Kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan maupun oleh Dinas/Instansi terkait. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kurangnya pemahaman warga masyarakat desa mengenai tugas, hak dan kewajibannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Desanya. Di sisi lainnya, Pemerintah Desa setempat juga kurang optimal dalam melakukan kegiatan sosialisasi, baik kepada perangkat desa maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ateng, Syafrudin. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*, Mandar Maju: Bandung. hlm.5.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa*, (Online), Vol.4, No.3, (<https://jurnal.unpad.ac.id>), diakses 29 Maret 2019
- Dwi Mustakarini, Indriyana, Pono, dan Pryo Sularso. 2017. *Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Pembangunan Desa*, (Online), Vol.3, No.1, (<https://ejournal.unipma.ac.id>), diakses pada tanggal 29 Maret 2019.
- Geordianus Ola& Ni Nyoman Kanti. (2013). Peranan BPD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. *Widyanata*, 18(2).
- Harijono Imbron, Yusrin Hakim. 2018. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto*, (Online), Vol.6, No.2, (<https://journal.umgo.ac.id>), diakses pada tanggal 29 Maret 2019.  
policy (Budiardjo, 2008: 406).
- Moloeng lexy, dr. 1986. *Metode Penelitian Kualitatif*. BPFE: Yogyakarta. Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Cetakan kedua*. Bappeda Propinsi NTB: Mataram.
- Pendi. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara*, (Online), Vol.5, No.3, (<https://ejournal.an.fisip.-unmul.ac.id>), diakses pada tanggal 29 Maret 2019.
- Prihantoro, Purwono BT. 2005. *Penelitian Perencanaan Pembangunan Tahunan Di Kabupaten Sleman*.
- Rudiansyah. 2014. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, (Online), Vol.2, No.1, (<https://ar.mian.fisipunmul.ac.id>), diakses 29 Maret 2019.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- W. Arthur Lewis. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Rineka Cipta: Jakarta. hlm. 316.

- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Cetakan ke-20.
- Kezia Tirsa Kembuan. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Eksekutif, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Yoga Wiguna, et, all. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2).<http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>